

ABSTRACT

Public participation is an equally important aspect in public financial management and in the implementation of open governance. Various studies on financial management transparency at the local level highlight that financial management implementation still falls short of transparency criteria. This lack of transparency is accompanied by underdeveloped public participation. Therefore, this study will attempt to explain the phenomenon of public participation in local financial management from an open government perspective.

This research uses a literature review method. The sources for the journal articles used in this study were Scopus and Google Scholar. The journal articles were searched using keywords and screened according to the author's established inclusion criteria.

The results of the literature review indicate that the implementation of public participation in regional financial management is often carried out by adopting a participatory budgeting model. Differences in financial management or budgeting were found in studies conducted in rural and urban areas. It is also explained that the implementation of participatory budgeting has implemented the dimensions of transparency, public participation, collaboration for innovation, and information technology, which are the pillars of open government.

The transparent regional financial management process, as part of the open government initiative, also faces obstacles and challenges, particularly related to limited resources, the complexity of budgeting procedures, and challenges to the sustainability of participatory budgeting processes. Consequently, the implementation of the open government concept in regional financial management has not yet achieved optimal results and benefits.

Keywords: public participation, local budget management, open government, literature study

INTISARI

Partisipasi publik merupakan aspek yang sama pentingnya dalam pengelolaan keuangan publik dan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Berbagai kajian tentang keterbukaan pengelolaan keuangan di lingkup daerah menyoroti pelaksanaan pengelolaan keuangan yang masih belum memenuhi kriteria keterbukaan. Kurangnya keterbukaan diikuti partisipasi publik yang masih kurang terbangun. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba memaparkan fenomena partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah menurut perspektif open government.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Sumber pencarian literatur artikel jurnal dalam penelitian ini adalah Scopus dan Google Scholar. Pencarian artikel jurnal dilakukan dengan kata kunci dan akan melalui proses penyaringan sesuai kriteria inklusi yang telah ditetapkan penulis.

Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa pengimplementasian partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah banyak dilakukan dengan mengadopsi model penganggaran partisipatif atau participatory budgeting. Ditemukan adanya perbedaan pengelolaan keuangan atau penganggaran pada penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dijelaskan pula bahwa pelaksanaan penganggaran partisipatif itu telah menjalankan dimensi transparansi, partisipasi publik, kolaborasi untuk inovasi serta teknologi informasi sebagai pilar-pilar dari open government.

Proses pengelolaan keuangan daerah yang terbuka sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan open government, juga mengalami hambatan dan tantangan terutama terkait keterbatasan sumber daya, kompleksitas prosedur penganggaran, dan tantangan untuk keberlanjutan proses anggaran partisipatif. Akibatnya, penerapan konsep open government dalam proses pengelolaan keuangan daerah belum memperoleh hasil dan manfaat yang optimal.

Kata kunci: partisipasi publik, pengelolaan keuangan daerah, open government, studi literatur